



RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA TAHUN 2025–2029



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Tarutung KM. 2 Saposurung, Balige, Kabupaten
Toba, Sumatera Utara



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

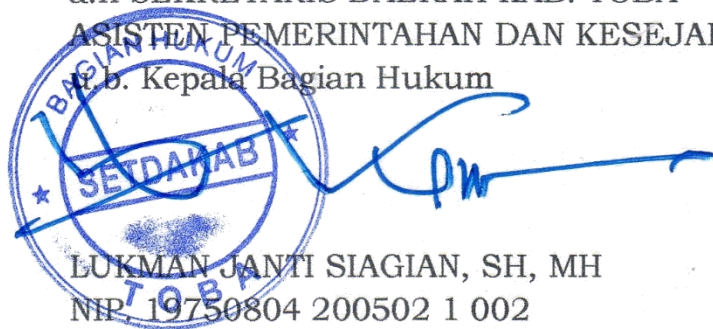
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
Bab I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo	7
2.1.2 Susunan Organisasi Dinas Kominfo	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	12
2.2.2 Sarana dan Prasarana	14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	17
2.4 Identifikasi Permasalahan, Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	22
2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika	24
2.6 Mitra Perangkat Daerah dan Pemberian Layanan.....	25

2.7	Penentuan Isu – isu Strategis.....	26
Bab III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN....	29
3.1	Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	29
3.2	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	32
3.3	Strategi Perangkat Daerah.....	35
3.4	Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah.....	40
3.5	Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	46
Bab IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1	Uraian Program	47
4.2	Uraian Kegiatan	50
4.3	Uraian Sub Kegiatan	60
4.4	Uraian Sub Kegiatan Prioritas	79
4.5	Uraian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	81
4.6	Uraian Indikator Kunci / Indikator Kinerja Daerah.....	83
Bab V.	PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai Diskominfo Kab Toba.....	13
Tabel 2.2.2	Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana	14
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Diskominfo Kab Toba	18
Tabel 2.3.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	19
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra PD.....	34
Tabel 3.2	Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika	39
Tabel 3.3	Penetapan Renstra PD.....	41
Tabel 3.4	Lokus Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.....	45
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	46
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	49
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan	52
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Pendanaan	63
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program	80
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra ...	82
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra PD	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi.....	10
Gambar 3.1	Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Toba.....	30

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 dimana dalam dokumen ini menjabarkan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja sekaligus berfungsi sebagai dokumen perangkat daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Tersusunnya Rencana Strategis ini disamping sebagai dokumen perencanaan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige, Oktober 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOBA

SESMON TOBERIUS BUTARBUTAR, S.Pd., M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 197310232007011004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterpaduan yang berkelanjutan dalam Pembangunan merupakan bentuk keterwujudan dari baiknya system perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kerja, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan transparansinya. Sebagai wujud dari sistem perencanaan yang baik dapat diwujudkan dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan untuk jangka lima tahun kedepan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba sebagai bentuk penyempurnaan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional:

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
14. PermenPANRB Nomor 3/2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi Pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kabupaten Toba;
2. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
4. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
- 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.7 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Utara
- 2.8 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah
- 3.3 Arah Kebijakan

Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan Prioritas
- 4.5 Target Tujuan, Sasaran, IKU
- 4.6 Target IKK/ IKD

Bab V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir, Peraturan Bupati Toba Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- f. penyelenggaraan komunikasi dan informatika;
- g. pembinaan kebijakan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- h. pengelolaan data dan informasi di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;

- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- k. pengelolaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika, persandian dan statistik;
- l. pengelolaan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. pengelolaan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.1.2. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II.b;
- b. Sekretaris, jabatan administrator/eselon III.a, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian, jabatan pengawas/es. IV.a;
 - 2. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik, jabatan pengawas/eselon IV.a.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional Pranata Humas Muda;

- d. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari :
 - 1. Jafung Manggala Komputer;
- e. Bidang Statistik dan Persandian, jabatan administrator/eselon III.b, terdiri dari:
 - 1. Seksi Statistik, jabatan pengawas/eselon IV.a;
 - 2. Seksi Persandian, jabatan pengawas/eselon IV.a.
 - 3. UPT/ Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:

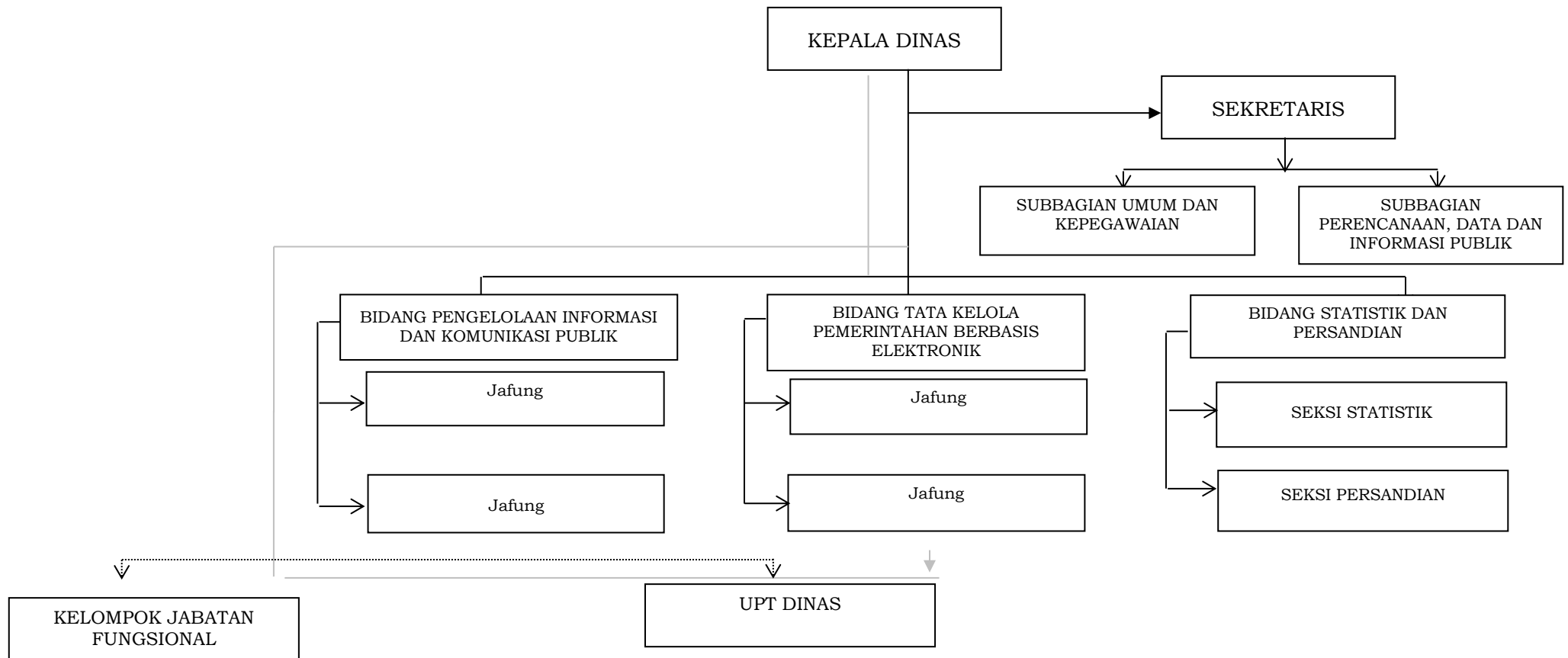
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR : 48 TAHUN 2021

TANGGAL : 05 Oktober 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat. Dalam mencapai peran yang diharapkan di atas, teknologi informasi diperlukan sumber daya manusia yang memahami bidang telekomunikasi dan informasi untuk dapat memberikan nilai tambah pada tiap tahap dari rantai pasokan informasi, yang terdiri dari komponen-komponen teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia terutama dari segi PNS yang berlatar belakang ilmu Teknologi Informasi dan Komunikasi, Persandian dan Statistik;
- b. Portal domain sudah menggunakan sub domain www.tobakab.go.id dengan beberapa sub domain yang merupakan website seluruh OPD;
- c. Tersedianya Anggaran (yang cukup); dan
- d. Tersedianya Tupoksi yang mendukung diseminasi Informasi, pengembangan dan implementasi e-government

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba sampai dengan bulan Agustus 2025, masih kurang optimal. Untuk tenaga fungsional jurnalistik, multimedia, fungsional ahli jaringan, programmer, sandiman, dan statistisi masih belum memadai jumlahnya sehingga masih melakukan perekrutan tenaga ahli secara kontrak untuk mendukung kelancaran publikasi informasi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4 (empat) orang, Tenaga Kontrak sebanyak 5 (lima) orang, Tenaga Ahli Programmer 1 (satu) orang, dan tenaga ahli multimedia sebanyak 2 (dua) orang.

Dari tabel di atas menggambarkan kondisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba masih tergolong kurang atau minim baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.2
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	KB	Rusak
1	Mobil	3	3	-	-
2	Sepeda Motor	1	1	-	-
3	Lap Top	11	8	1	2
4	Note Book	7	6	1	-
5	Printer	17	14	1	2
6	P.C Unit	13	2	8	3
7	Kursi	88	87	-	1
8	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	1	-	-
9	Meja	25	25	-	-
10	Filing Cabinet Besi	1	1	-	-
11	Lemari Besi/Metal	4	2	-	2
12	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	9	9	-	-
13	Rak Peralatan	1	1	-	-
14	A.C. Split	5	5	-	-
15	A.C. Window	1	1	-	-
16	Audio Logging Recorder	5	5	-	-
17	Bracket Standing Peralatan	1	1	-	-

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	KB	Rusak
18	Camera Tune Simulator	1	-	-	1
19	Kamera	4	3	-	1
20	Clipp On	1	1		
21	Disk Pack (Peralatan Mini Komputer)	10	10	-	-
22	External/ Portable Hardisk	3	3	-	-
23	Genset	1	1	-	-
24	Handy Cam	1	1	-	-
25	Hard Disk	17	15	-	2
26	Hub	9	8	-	1
27	Hubbel UTP	1	1	-	-
28	Komputer Unit Lainnya	1	1	-	-
29	Local Area Network (LAN)	3	3	-	-
30	Loudspekaer	1	1	-	-
31	Mainframe (Komputer Jaringan)	2	1	-	1
32	Meubeleur lainnya	5	4	-	1
33	Micropone	4	4	-	-
34	Microphone Table Stand	1	1	-	-
35	Microphone Cable	1	1	-	-
36	Microphone Connector Box	1	-	1	-
37	Mixer	2	2	-	-
38	Netware Interface External	1	1	-	-
39	Off Air TV Monitor	1	1	-	-
40	Televisi	3	2	-	1
41	Video Monitor	1	-	-	1
42	Papan Pengumuman	4	4	-	-
43	Peralatan Jaringan lainnya	1	-	-	1
44	Peralatan Komputer lainnya	2	2	-	-
45	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	2	-	-
46	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)	1	1	-	-
47	Personal Computer	3	2	-	1
48	Proyektor Romad Compleat	1	-	-	1
49	Router	1	1	-	-
50	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	1	-	1
51	Server	1	1	-	-
52	Software Conf Off-Line Computer	2	2	-	-
53	Tangga Aluminium	1	1	-	-

NO	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			Baik	KB	Rusak
54	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	-	-	1
55	Tas Kamera	4	4	-	-
56	Tripod Camera	2	2	-	-
57	Tripod	1	1	-	-
58	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	-	-
59	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	1	-	1	-
60	Global Positoning System	1	-	-	1
61	Canon	1	-	-	1
62	Alat Dapur Lainnya	6	6	-	-
63	Alat Kantor Lainnya	4	3	1	-
64	Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	1	-	-
65	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	1	-	1	-
66	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	1	1	-	-
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	-
68	Jaringan Transmisi Tegangan 1 S/D 3KVA	1	1	-	-
Total Jumlah		316	275	15	26

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, Good Government tata pemerintahan yang baik dan bersih serta berbasis digital, merupakan issue pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi. Disamping itu semakin ketatnya persaingan global, menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Toba dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good government). Hal tersebut diwujudkan dengan menetapkan sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Tahun 2024 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Indeks SPBE, dengan sasaran yang sama yaitu meningkatnya keterbukaan informasi publik dan meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dapat diukur berdasarkan target Renstra OPD dan realisasi capaiannya selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Capaian Kinerja PD berdasarkan RPJMD Kabupaten Toba dan Review Renstra Tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Indeks SPBE		3		N/A	1,43	2,50	2,70	3,0	N/A	1,69	1,86	2,16	2,95	N/A	100	74.4	80	98
2.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		60		N/A	60	65	65	75	N/A	60	65	75	75	N/A	100	100	100	100
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik		70		70,06	70,11	70,16	70,20	70,25	70	70	70	70	70	99	99	99	99	99
3	Jumlah website Perangkat Daerah yang memiliki sub domain resmi		43		N/A	N/A	N/A	43	43	N/A	N/A	N/A	43	43	100	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%		N/A	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun Evaluasi pembangunan daerah		100%		N/A	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi/keamanan informasi dalam komunikasi Perangkat Daerah		90%		N/A	60	70	80	90	0	60	70	80	90	100	100	100	100	100

Tabel 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Toba

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Realisasi dan anggaran pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	N/A	N/A	N/A	Rp.1.111.460.193		N/A	N/A	N/A	Rp.915.404.395		N/A	N/A	N/A	82,36 %	
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	N/A	N/A	N/A	Rp.1.022.396.990		N/A	N/A	N/A	Rp.1.000.598.836		N/A	N/A	N/A	97,87 %	
3.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	N/A	N/A	N/A	Rp.3.027.667.533		N/A	N/A	N/A	Rp.2.545.748.593		N/A	N/A	N/A	84,08 %	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	N/A	N/A	N/A	Rp.87.648.061		N/A	N/A	N/A	Rp.76.256.119		N/A	N/A	N/A	87,00 %	
5.	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	N/A	N/A	N/A	Rp.92.456.140		N/A	N/A	N/A	Rp.68.721.028		N/A	N/A	N/A		
6.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	N/A	N/A	N/A		Rp.856.755.122	N/A	N/A	N/A		Rp.805.053.548	N/A	N/A	N/A		93,97 %
7.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	N/A	N/A	N/A		Rp.3.617.254.990	N/A	N/A	N/A		Rp.3.547.175.538	N/A	N/A	N/A		98,06 %

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks SPBE yang merupakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada tahun 2023 dengan target nilai capaian 2,70 namun nilai capaian akhir yang diperoleh adalah 2,16 setelah penilaian akhir tahun 2023, untuk tahun 2024 target nilai Indeks SPBE adalah 3,0 dan nilai capaian akhir yang diperoleh adalah 2,95 dimana nilai ini naik dan hampir mencapai target 2024 sebesar 3,0
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik untuk tahun 2023 targetnya adalah 65% dan capaian pada akhir tahun adalah 75%, untuk tahun 2024 target 75% dan dimana capaian 75% ini menggambarkan bahwa publikasi keterbukaan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintahan dapat tersebar dengan baik di tengah – tengah masyarakat.
3. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran penyebaran informasi dengan target 2023 adalah 70,20% dan akhir tahun nilai capaiannya adalah 70%, target untuk 2024 adalah 70,25% dan target ini dapat dicapai pada akhir tahun yaitu 70% dengan data capaian yang disebarakan lewat jumlah pemberitaan baik di media sosial, spanduk, dan informasi lewat radio yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tersampaikan kepada kalangan masyarakat
4. Website milik pemerintah Kabupaten Toba adalah www.tobakab.go.id, yang memiliki sub domain resmi sebanyak 43 Sub domain yang dapat menampilkan berbagai informasi tentang pembangunan daerah Kabupaten Toba oleh masing-masing PD.
5. Jumlah Perangkat daerah yang menjadi layanan jaringan internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dan 2024 adalah 43 Perangkat Daerah atau dengan rasio target capaian 100%.

6. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2023 dan 2024 adalah 100% hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya Perangkat Daerah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.
7. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun Evaluasi pembangunan daerah, dalam tahun 2023 dan 2024 menunjukkan angka 100% hal ini menunjukkan bahwa sudah semua Perangkat Daerah sudah memanfaatkan data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerahnya.
8. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi/keamanan informasi dalam komunikasi Perangkat Daerah pada tahun 2023 dengan target 80%, dan tahun 2024 dengan target 90% Perangkat daerah dan yang tercapai adalah 90% Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi/kemanan informasi dan hal ini menunjukkan bahwa pengamanan informasi di setiap perangkat daerah sudah tinggi dan terdapat beberapa perubahan penanggung jawab PD. Pengamanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika masih sebatas pengamanan surat surat yang dikirim lewat aplikasi SANAPATI, dan Tanda Tangan Elektronik yang sudah bekerja sama dengan pihak BSSN (Badan Sandi dan Siber Negara).

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelaksanaan e-Government dalam tatakelola pemerintahan dan layanan publik berbasis digital	Belum optimalnya penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya pengembangan e-Government.
		Belum optimalnya penyebaran informasi pemerintah daerah kepada publik.	Masih kurangnya kesadaran PD untuk memberikan informasi pada publik
		Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik sektoral	Kurangnya pemahaman PD sebagai produsen data untuk pemenuhan data statistik sektoral dalam perencanaan
		Belum optimalnya pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar pemerintah Kabupaten Toba dengan pusat dan provinsi	Masih kurangnya tata kelola keamanan informasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memiliki permasalahan-permasalahan baik kondisi Internal maupun Eksternal.

Masalah yang bersifat internal:

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan adanya program yang pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan dan sasaran yang sama.
4. Masih belum optimalnya penyediaan dana yang mendukung terhadap program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Masalah yang bersifat eksternal:

Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba maupun dengan Instansi Vertikal

2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika sangat luas dan mencakup seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai sektor terkait. Secara umum, kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk masyarakat umum, pelaku usaha, instansi pemerintah, dan media massa.

1. Organisasi/Masyarakat Umum

Penyebaran informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan akses informasi yang mudah dan akurat kepada masyarakat tentang berbagai program, kebijakan, dan kegiatan Pemerintah Daerah. Peningkatan literasi digital, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan berbagai pelatihan dan program untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

2. Pelaku Usaha

Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan ekosistem digital dan membantu pelaku usaha dalam mempromosikan produk dan jasa melalui berbagai platform digital, regulasi, perizinan.

3. Instansi Pemerintah

Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam membangun dan mengelola sistem informasi yang terintegrasi dan efisiensi untuk mendukung pelayanan publik. Dinas komunikasi dan Informatika berperan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan transparansi,

efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik berbasis digital.

4. Media Massa

Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kerjasama dengan beberapa media terkait penyampaian informasi Pemerintah Daerah baik wartawan media cetak maupun media elektronik yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan urusan komunikasi dan informati, statistik dan persandian.

Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

1. Penyedia Infrastruktur Digital

Mitra dalam pengembangan infrastruktur digital bisa juga mencakup perusahaan telekomunikasi dan teknologi yang membantu penyediaan layanan seluler atau jaringan broadband.

2. Lembaga Non-Pemerintah dan Komunitas

Komunitas - komunitas yang fokus pada edukasi digital atau transformasi teknologi juga bisa menjadi mitra Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.

3. Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Institusi pendidikan dan penelitian dapat menjadi mitra dalam program pengembangan SDM di bidang digital

4. Kementerian terkait (KOMDIGI dan BPS)

Kemitraan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk penguatan program kerja komunikasi, informasi dan digital, statistik dan persandian melalui koordinasi kerjasama dalam rangka penyusunan statistik daerah.

5. Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika bertindak sebagai mitra bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) lainnya melalui penyediaan layanan infrastruktur digital, pengembangan sistem informasi, pengelolaan data dan keamanan siber, serta pemberian dukungan konsultasi teknologi informasi, yang bertujuan mendukung efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan.

2.7 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu: permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Isu strategis merupakan suatu keadaan yang berpotensi menjadi masalah ataupun menjadi peluang yang berorientasi pada masa depan dan masih lemahnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Berikut adalah beberapa isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba:

a. **Penyebaran dan kualitas informasi**

- Belum optimalnya pengawasan masyarakat terhadap penyiaran informasi yang berkualitas

Melakukan edukasi dan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

- Diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah yang masih rendah.

Meningkatkan partisipasi masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi, perbaikan koordinasi, penyederhanaan bahasa informasi, dan pelibatan media lokal.

b. **Literasi digital dan keamanan siber**

- Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah

melakukan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan yang intensif melalui berbagai kanal komunikasi. Ini meliputi peningkatan kesadaran melalui kampanye digital dan tatap muka, serta penyediaan teknologi dan sistem persandian yang lebih mudah digunakan dan dipahami oleh masyarakat umum, seperti enkripsi data dan otentikasi berlapis

- Perlunya memperkuat pertahanan keamanan siber

Peningkatan penguatan aspek teknis (seperti menggunakan autentikasi dua faktor, enkripsi, dan pembaruan sistem secara berkala), peningkatan kesadaran dan keterampilan pengguna (melalui pelatihan dan edukasi), serta penerapan kebijakan keamanan yang ketat dan kolaborasi baik secara internal maupun internasional

c. Pengelolaan data dan statistik

- Belum adanya *updating* data statistik sektoral maupun statistik secara keseluruhan

meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar instansi sektoral dan dengan BPS. Selain itu, perlu ada implementasi sistem pengumpulan data yang lebih efisien, penetapan standar data yang jelas, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola data

- Perlunya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang tepat

Peningkatan Pemahaman pentingnya Pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan untuk merancang langkah-langkah yang lebih terarah, efisien, dan efektif

d. Infrastruktur dan teknologi informasi

- Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur TIK yang masih perlu ditingkatkan

Peningkatan perencanaan matang dan terintegrasi, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, pemanfaatan teknologi penguatan keamanan, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta

- Mendorong kemandirian bangsa melalui pemanfaatan teknologi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024 yang menjadi gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Toba yang akan dicapai pada tahun 2029. Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah

“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”

Makna yang terkandung dalam visi Kabupaten Toba dijabarkan sebagai berikut:

Maju Daerahnya bermakna bahwa Kabupaten Toba menjadi daerah yang dapat berdiri sejajar dan bersaing dengan daerah lainnya dengan terwujudnya pembangunan yang memberikan hasil yang nyata dan bermanfaat maksimal kepada masyarakat; tersedia infrastruktur yang berkualitas secara merata; sumber daya manusia yang semakin berkualitas; serta terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sejahtera Rakyatnya bermakna masyarakat menikmati kualitas hidup yang lebih baik ditandai dengan meningkatnya pendapatan, berkurangnya kemiskinan serta hasil-hasil pembangunan yang dirasakan secara lebih merata.

Berkelanjutan Pembangunannya bermakna Pembangunan daerah yang berfokus kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus tetap memperhatikan kesejahteraan generasi yang akan datang.

Gambar 3.1 Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Toba dengan Visi RPJPD Kabupaten Toba, Visi RPJMD Propinsi Sumut Tahun 2025 - 2029, dan Visi RPJMN Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029



Tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Toba.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya bahwa terdapat 6 (enam) Misi Kepala Daerah pada RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029. Salah satu Misi tersebut yang terkait dengan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi ke 4 (empat) yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih sebagai Pelayan (Parhobas) Rakyat**. Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menyusun tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba tahun 2025-2029 adalah : **“Terwujudnya Transformasi layanan publik berbasis digital, statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi”**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika diatas ditetapkan indikator kinerja yaitu Indeks Sistem Pemerintahan berbasis elektronik.

3.2 SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Toba yaitu Terwujudnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital, statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi maka Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital;**

Untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital** ditetapkan indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Toba dan **pada tahun 2026 indeks SPBE ini akan berubah menjadi Indeks Pemerintahan Digital**

2. **Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan dapat diandalkan;**

Untuk mengukur keberhasilan sasaran **Terwujudnya Layanan Statistik yang Akurat dan Dapat Diandalkan** ditetapkan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Toba

3. **Meningkatnya Keamanan Informasi**

Untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya Keamanan Informasi** ditetapkan indikator kinerja Tingkat keamanan informasi pemerintah

4. **Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;**

Untuk mengukur keberhasilan sasaran **Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah** ditetapkan indikator kinerja Evaluasi Internal AKIP

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital, statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,95	3,15	3,20	3,25	3,30	3,35	3,45	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,36	2,6	2,8	2,85	2,9	3,0	3,1	
			Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	40	80	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,95	2,95	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	
		terwujudnya layanan Statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,36	2,6	2,8	2,85	2,9	3,0	3,1	
		Meningkatnya keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	40	90	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	63,50	69,90	72,30	74,20	75,70	76,90	79,00	

3.3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Toba maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik memerlukan pendekatan yang holistik dan strategis, yang melibatkan teknologi, keterampilan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan digital untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara *real-time*, memberikan pembaruan berkala terkait program-program pemerintah, kebijakan baru, serta hasil yang telah dicapai dapat dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Selain itu, melayani aduan publik dengan respon cepat dan tepat adalah kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Respon yang cepat saja tidak cukup, karena harus diikuti dengan solusi yang tepat dan efektif.

2. Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika

Peningkatan pengelolaan aplikasi informatika dalam konteks SPBE sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif. SPBE bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan oleh pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain yaitu pengintegrasian sistem dan aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi informatika di berbagai instansi pemerintah terintegrasi dengan baik, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan internet serta konektivitas, keamanan data dan perlindungan informasi dan mematuhi peraturan terkait perlindungan data pribadi dan privasi, peningkatan kapasitas pengelola aplikasi (menyediakan pelatihan teknis untuk para pengelola aplikasi dan tenaga IT pemerintah agar mereka memiliki keterampilan terbaru dalam mengelola aplikasi berbasis SPBE), serta meningkatkan literasi digital baik untuk pegawai pemerintah maupun masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan aplikasi informatika dengan optimal.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan Transformasi Layanan Publik berbasis digital, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan literasi digital yang dikemas dalam bentuk gelar wicara (talk show), diskusi, atau sosialisasi interaktif, dengan membahas berbagai topik, antara lain pemasaran digital (digital marketing), pembuatan konten kreatif, pemanfaatan teknologi informasi, serta isu penting terkait keamanan informasi dan etika digital. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya menyasar pelaku UMKM, tetapi juga masyarakat umum dan pelajar, yang bertujuan adalah untuk memperluas dampak program sekaligus memperkuat budaya digital yang sehat dan produktif di Kabupaten Toba.

3. Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Penyelenggaraan statistik sektoral yang efektif sangat penting untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pemerintahan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Statistik sektoral adalah data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan berdasarkan sektor atau bidang tertentu. Peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral akan menghasilkan data yang lebih akurat, terperinci, dan tepat waktu, yang sangat dibutuhkan oleh pengambil kebijakan, lembaga pemerintah, serta masyarakat.

4. Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Dalam era digital saat ini, di mana data dan informasi sangat rentan terhadap ancaman siber, penerapan teknologi persandian yang efektif adalah kunci untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data yang dikirimkan atau disimpan. Meningkatkan penyelenggaraan persandian dalam pengamanan informasi akan membantu meminimalkan risiko kebocoran data, pencurian identitas, dan gangguan keamanan lainnya. Peningkatan penyelenggaraan persandian melalui Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah bertujuan untuk memperkuat sistem pengamanan informasi, menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta memastikan bahwa setiap proses pengelolaan informasi terlindungi dari ancaman yang tidak diinginkan.

Untuk mengurangi risiko keamanan informasi, organisasi dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Menentukan kebijakan keamanan informasi yang jelas dan transparan. Kebijakan ini harus diikuti oleh seluruh pegawai dan harus mencakup semua aspek keamanan informasi.

2. Melakukan pelatihan keamanan informasi kepada seluruh pegawai. mencakup kesadaran tentang risiko keamanan informasi dan tindakan yang harus diambil untuk menghindari risiko tersebut.
3. Melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan informasi dan mengambil tindakan untuk meminimalkannya.
4. Menggunakan teknologi keamanan informasi seperti firewalls, anti-virus, dan enkripsi data untuk melindungi sistem dan data dari serangan siber.
5. Menerapkan praktik keamanan yang ketat seperti otentikasi pengguna, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas.

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP membantu untuk memastikan transparansi, optimalisasi penggunaan anggaran, serta pencapaian sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.

Tabel 3.2 Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital, statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya keamanan informasi	Meningkatnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika	penguatan infrastruktur digital, manajemen informasi publik yang lebih baik, pengelolaan opini publik, tata kelola TIK yang terintegrasi
	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	membina dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, dalam produksi statistik yang akurat, tepat waktu, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi tersebut
	Meningkatnya keamanan Informasi	Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	penetapan regulasi (Perkada), peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan), kerja sama, dan penyediaan layanan keamanan informasi
	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	peningkatan kinerja instansi pemerintah, penguatan akuntabilitasnya, serta memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien

3.4 PENAHAPAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

Tahapan pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba mengacu pada RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029 yang mencerminkan kerangka waktu yang disusun untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Penahapan ini dirancang dengan pendekatan tematik yang mencerminkan strategi dalam mencapai target pembangunan. Setiap tahapan pembangunan memiliki fokus tematik tertentu, yang menggambarkan langkah-langkah strategis sekaligus sebagai tema pembangunan. Meskipun penekanan diberikan pada tema besar pembangunan di setiap tahapan, penting untuk dipahami bahwa seluruh sektor pembangunan akan terus berperan aktif dan berkembang secara sinergis, untuk memastikan bahwa setiap tema pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tidak bertumpu pada satu sektor tertentu.

Tujuan dari penahapan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan yang jelas, terfokus, dan terukur dalam mencapai tujuan pembangunan. Melalui penentuan fokus prioritas tematik setiap tahunnya, diharapkan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang maksimal dan relevan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada masing-masing tahapan.

Dengan dukungan yang kuat dari seluruh sektor, tahapan pertama hingga kelima akan saling mendukung dalam membentuk proses pembangunan yang holistik dan terkoordinasi. Pada akhir periode 2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan yang telah ditetapkan dan siap untuk melanjutkan fase-fase pembangunan berikutnya.

Sebagai bagian dari rencana pembangunan yang berkelanjutan, tahapan pembangunan ini juga akan menjadi dasar dalam penentuan alokasi sumber daya, penjadwalan kegiatan, serta penetapan indikator keberhasilan untuk masing-

masing sektor. Penekanan pada fokus tematik dirancang untuk memastikan bahwa setiap sektor akan berkembang secara seimbang dan dinamis, dengan prioritas yang disesuaikan dengan tantangan dan potensi yang ada pada setiap tahapannya. Oleh karena itu, pada akhir periode pembangunan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya secara utuh visi pembangunan Kabupaten Toba, yaitu **“TOBA MANTAP 2029 Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**, yang menjadi pedoman dalam setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan daerah.

Sesuai dengan penjabaran konsep penahapan pembangunan tersebut, maka tahapan pembangunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba 2025-2029 merujuk pada tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 terbagi ke dalam lima tahapan, meliputi:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pemerintahan berbasis elektronik / digital
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik berbasis digital;
3. Akselerasi Pemerintahan berbasis elektronik / digital;
4. Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik / digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan; dan
5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kesiambungan Pemerintahan berbasis elektronik / digital.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan dasar dan kapasitas Pemerintahan berbasis elektronik / digital	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik berbasis digital	Akselerasi Pemerintahan berbasis elektronik / digital	Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik / digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesiambungan Pemerintahan berbasis elektronik / digital

Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Dasar dan Kapasitas Pemerintahan Berbasis Elektronik / Pemerintahan Digital

Tahap pertama dalam pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pemerintahan berbasis elektronik / digital, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik serta suprastruktur yang bersifat non-fisik menjadi dua hal yang sangat penting untuk dibangun secara paralel dan terintegrasi sehingga memiliki dasar pembangunan yang kokoh. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh komponen pembangunan dapat saling mendukung dan terkoordinasi dengan baik. Melalui penyiapan kerangka kebijakan yang jelas serta tata kelola yang baik, pembangunan pemerintahan berbasis elektronik / digital dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Dengan demikian, tahapan pertama ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian visi "**TOBA MANTAP 2029 Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya**".

2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital

Tahap kedua merupakan tahapan lanjut dari tema pembangunan tahap pertama, dengan dasar-dasar pembangunan pemerintahan yang berbasis elektronik / digital, seperti dukungan kebijakan serta kapasitas sumber daya dan kelembagaan.

Fokus utama dari tahap ini adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital yang berorientasi pada menciptakan layanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perluasan akses layanan publik ini tidak dimaknai sempit terbatas pada aspek jangkauan layanan secara geografis, tetapi lebih pada upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Toba dapat

dengan mudah mengakses layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik akan menjadi kunci utama sehingga dapat mempercepat proses, memangkas birokrasi, serta meningkatkan efisiensi maupun transparansi.

3. Akselerasi Pemerintahan Berbasis Elektronik / Digital

Tahap ketiga merupakan fase kunci dalam upaya memastikan terwujudnya Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Toba dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Toba di akhir tahun perencanaan.

Pada tahap ini, fokus utama yang dilakukan adalah mempercepat pencapaian target-target pembangunan pemerintahan berbasis elektronik / digital yang telah ditetapkan, khususnya terhadap program yang belum mencapai hasil optimal selama periode pembangunan yang telah berjalan.

Upaya akselerasi ini sekaligus merupakan upaya mitigasi yang sangat penting untuk menghindari risiko tidak tercapainya target pembangunan sebagai bagian dari proses mewujudkan visi " TOBA MANTAP 2029 Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya ".

4. Pemerintahan Berbasis Elektronik / Digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat berfokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, yang merupakan hasil dari fondasi yang kuat yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini, integrasi pembangunan menekankan pada pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor sebagai faktor kunci untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga bersifat inklusif, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Integrasi ini juga

mencakup peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tahap keempat ini sekaligus menjadi tahapan yang memastikan bahwa pembangunan yang telah dicapai dapat terkoordinasi dengan baik, memberikan dampak yang lebih luas dan merata, serta dapat diteruskan melalui sistem yang efisien dan berkelanjutan, yang mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kestinambungan Pemerintahan berbasis elektronik / digital

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target tujuan dan sasaran Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Toba tercapai sebagai indikator keberhasilan guna mendukung terwujudnya visi :

" TOBA MANTAP 2029 Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya "

Tahap ini juga menjadi fase transisi menuju tahapan lanjut dalam kerangka pembangunan jangka panjang (Periode 2030-2034), Oleh karena itu, tahap kelima ini juga menjadi tahap yang berfokus pada proses konsolidasi kestinambungan pembangunan. Artinya, pembangunan di Kabupaten Toba dipandang sebagai pembangunan yang berkesinambungan dengan tetap mendasarkan pada pelaksanaan maupun capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan konsolidasi yang kuat, hasil-hasil yang telah dicapai akan diperkuat dan dipertahankan, menciptakan dasar yang kokoh untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka panjang Kabupaten Toba

Tabel 3.4 Lokasi khusus Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Tahapan	Fokus Kegiatan	Lokasi Khusus Pelaksanaan
Tahap I (2026)	Penguatan dasar dan kapasitas Pemerintahan berbasis elektronik / digital	Semua Perangkat Daerah
Tahap II (2027)	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik berbasis digital	Semua Perangkat Daerah
Tahap III (2028)	Akselerasi Pemerintahan berbasis elektronik / digital	Semua Perangkat Daerah
Tahap IV (2029)	Pembangunan Pemerintahan berbasis elektronik / digital yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Semua Perangkat Daerah
Tahap IV (2030)	Penyelesaian dan Konsolidasi Kestinambungan Pemerintahan berbasis elektronik / digital	Semua Perangkat Daerah

3.5 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital	Percepatan digitalisasi layanan publik untuk penguatan aspek pemerintahan digital	penguatan infrastruktur digital, manajemen informasi publik yang lebih baik, pengelolaan opini publik, tata kelola TIK yang terintegrasi	Bidang PIKP Bidang TKPBE
2	Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan		membina dan mengoordinasikan Perangkat Daerah, dalam produksi statistik yang akurat, tepat waktu, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi tersebut	Bidang SP
3	Meningkatnya Keamanan Informasi		penetapan regulasi (Perkada), peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan), kerja sama, dan penyediaan layanan keamanan informasi	Bidang SP
4	Meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		peningkatan kinerja instansi pemerintah, penguatan akuntabilitasnya, serta memastikan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien	Sekretariat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dengan mempedomani Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

4.1. Uraian Program

Untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama lima tahun kedepan terdapat 5 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika program ini bertujuan untuk peningkatan layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik program ini bertujuan untuk peningkatan penyebaran informasi public, kebijakan, dan program prioritas pemerintah.
3. Program penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk peningkatan penggunaan data statistik dalam penyusunan perencanaan Pembangunan daerah.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi bertujuan untuk peningkatan keamanan informasi pemerintah.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota program ini bertujuan untuk menunjang peningkatan nilai akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

TABEL 4.1 PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TOBA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.601.238.000,00		5.823.835.000,00		5.806.868.000,00		6.030.346.000,00		6.344.277.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.319.438.000,00		2.412.035.000,00		2.395.068.000,00		2.548.546.000,00		2.712.477.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	63,50	69,00	71,20	2.319.438.000,00	73,40	2.412.035.000,00	75,60	2.395.068.000,00	77,80	2.548.546.000,00	80,00	2.712.477.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi (%)	70,20	70,25	70,30	200.000.000,00	70,35	300.000.000,00	70,40	300.000.000,00	70,45	300.000.000,00	70,50	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.081.800.000,00		3.111.800.000,00		3.111.800.000,00		3.181.800.000,00		3.281.800.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100	3.081.800.000,00	100	3.111.800.000,00	100	3.111.800.000,00	100	3.181.800.000,00	100	3.281.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik daerah	Persentase Publikasi Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) dalam Modul E-Validata SIPD (Persentase)	97,70	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	40	80	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
TOTAL KESELURUHAN					5671238000,00		5893835000,00		5896868000,00		6140346000,00		6464277000,00	

4.2 Uraian Kegiatan

Kelima program diatas mempunyai kegiatan antara lain:

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan:
 - Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa;
 - Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:
 - Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Program penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/ kota;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota;
 - penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah
 - Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/ kota;
 - Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan kegiatan:

- Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- Administrasi keuangan perangkat daerah;
- Administrasi umum perangkat daerah;
- Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya Transformasi Layanan Publik berbasis digital, statistik yang akurat dan dapat diandalkan dan meningkatnya kemandirian				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)				
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)				
					Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)				
		Meningkatnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)		
							Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
							Peningkatan Penyebaran Informasi publik terkait kebijakan dan kegiatan prioritas pemerintah kepada masyarakat	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2 terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.2.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
		Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik daerah		Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya keamanan informasi			Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)		
			Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah		Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Peningkatan Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Peningkatan Pelayanan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Peningkatan pelayanan umum kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Ketersediaan barang penunjang pelayanan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Peningkatan Pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang milik negara penunjang pelayanan kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian Sub Kegiatan

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Subkegiatan:
 - Pengelolaan nama domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa;
 - Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi;
 - Fasilitasi penyelenggaraan audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo;
 - Koordinasi Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE;
 - Penyelenggaraan system penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan;
 - Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
 - Penyediaan akses internet;
 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah;
 - Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Sub kegiatan:
 - Relasi Media;
 - Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi Masyarakat;
 - Pelayanan informasi publik;
 - Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi public;
 - Diseminasi informasi.

3. Program penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Sub kegiatan:
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral;
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Sub kegiatan:
 - Penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah;
 - Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dengan Sub kegiatan:
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
 - Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor;
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitasi kunjungan tamu;
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
 - Pengadaan mebel;
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik;
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
- Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

Secara terperinci Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.3 terlampir.

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.601.238.000,00		5.823.835.000,00		5.806.868.000,00		6.030.346.000,00		6.344.277.000,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.319.438.000,00		2.412.035.000,00		2.395.068.000,00		2.548.546.000,00		2.712.477.000,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	63,50	71,20	2.319.438.000,00	73,40	2.412.035.000,00	75,60	2.395.068.000,00	77,80	2.548.546.000,00	80,00	2.712.477.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0 0 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	20.000.000,00	3	30.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00		
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	10.000.000,00	3	15.000.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.910.000.000,00		1.910.000.000,00		1.910.000.000,00		1.953.266.000,00		1.958.265.464,00		
Peningkatan Pelayanan kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	16	23	1.910.000.000,00	23	1.910.000.000,00	23	1.910.000.000,00	24	1.953.266.000,00	24	1.958.265.464,00		

	Tunjangan ASN (Orang/bulan)												
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.910.000.000,00		1.910.000.000,00		1.910.000.000,00		1.953.266.000,00		1.958.265.464,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16	23	1.910.000.000,00	23	1.910.000.000,00	23	1.910.000.000,00	24	1.953.266.000,00	24	1.958.265.464,00	
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				240.000.000,00		240.000.000,00		276.068.000,00		321.280.000,00		315.211.536,00	
Peningkatan pelayanan umum kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20	20	240.000.000,00	20	240.000.000,00	20	276.068.000,00	20	321.280.000,00	20	315.211.536,00	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	12		12		12		12		12		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		13.280.000,00		7.211.536,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	13.280.000,00	12	7.211.536,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		
Ketersediaan barang penunjang pelayanan kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	20.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		0,00		20.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	20.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.438.000,00		83.035.000,00		80.000.000,00		115.000.000,00		200.000.000,00		
Peningkatan Pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	90.438.000,00	12	83.035.000,00	12	80.000.000,00	12	115.000.000,00	12	200.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				50.438.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	50.438.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				40.000.000,00		43.035.000,00		40.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	40.000.000,00	12	43.035.000,00	12	40.000.000,00	12	75.000.000,00	12	100.000.000,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				69.000.000,00		169.000.000,00		119.000.000,00		119.000.000,00		169.000.000,00		
Terpeliharanya Barang milik negara penunjang pelayanan kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	69.000.000,00	1	169.000.000,00	0	119.000.000,00	0	119.000.000,00	1	169.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6		6		6		6					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10					
2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	50.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00		

2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	19.000.000,00	10	19.000.000,00	10	19.000.000,00	10	19.000.000,00	10	19.000.000,00		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi (%)	70,20	70,30	200.000.000,00	70,35	300.000.000,00	70,40	300.000.000,00	70,45	300.000.000,00	70,50	350.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Peningkatan Penyebaran Informasi publik terkait kebijakan dan kegiatan prioritas pemerintah kepada masyarakat	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	350.000.000,00		
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	5		8		12		14		16			
	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	70	70		70,25		70,30		70,40		70,50			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	12	12		12		12		12		12			
2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media				50.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	0	5	50.000.000,00	8	50.000.000,00	12	50.000.000,00	14	75.000.000,00	16	75.000.000,00		

2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				30.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		30.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	12	12	30.000.000,00	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	30.000.000,00	12	80.000.000,00		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	0	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	70	70	50.000.000,00	70,25	50.000.000,00	70,30	50.000.000,00	70,40	75.000.000,00	70,50	75.000.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				3.081.800.000,00		3.111.800.000,00		3.111.800.000,00		3.181.800.000,00		3.281.800.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	3.081.800.000,00	100	3.111.800.000,00	100	3.111.800.000,00	100	3.181.800.000,00	100	3.281.800.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)			0		0		0		0		0		
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.081.800.000,00		3.111.800.000,00		3.111.800.000,00		3.181.800.000,00		3.281.800.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	3.081.800.000,00	1	3.111.800.000,00	1	3.111.800.000,00	1	3.181.800.000,00	1	3.281.800.000,00		

	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2	4		4		4		4		4		
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	0		0		0		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				2.581.800.000,00		2.581.800.000,00		2.581.800.000,00		2.611.800.000,00		2.711.800.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	43	43	2.581.800.000,00	43	2.581.800.000,00	43	2.581.800.000,00	43	2.611.800.000,00	43	2.711.800.000,00		
2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				0,00		0,00		0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik daerah	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	97,70	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		

pembangunan daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	43	43		43		43		43		43			
2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	43	43	30.000.000,00	43	30.000.000,00	43	50.000.000,00	43	60.000.000,00	43	70.000.000,00		
2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERAN GKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	40	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Peningkatan Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	1		1		1		2		2			
2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		

4.4 Uraian Sub kegiatan Prioritas

Sub kegiatan prioritas untuk pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Subkegiatan:
 - Pengelolaan nama domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa;
 - Koordinasi pemanfaatan portal pelayanan pemerintah daerah yang terintegrasi;
 - Koordinasi Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan aplikasi umum SPBE;
 - Penyelenggaraan system penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan;
 - Koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
 - Penyediaan akses internet;
 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah;
 - Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Sub kegiatan:
 - Relasi Media;
 - Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi Masyarakat;
 - Pelayanan informasi public;
 - Monitoring informasi kebijakan, opini, dan aspirasi publik;
 - Diseminasi informasi.

3. Program penyelenggaraan Statistik Sektorial dengan Sub kegiatan:
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral;

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Subkegiatan:
 - Penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah;
 - Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah.

Uraian Sub Kegiatan Prioritas pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 4.4 terlampir

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
1.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	

4.5 Uraian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), uraian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 4.5 terlampir.

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika									
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,95	3,15	3,20	3,25	3,30	3,35	3,45	
3.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,36	2,6	2,8	2,85	2,9	3,0	3,1	
4.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40	80	100	100	100	100	100	
5.	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	63,50	69,00	71,20	73,40	75,60	77,80	80,00	

4.6 Uraian Indikator Kunci/ Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba. Indikator kunci yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pencapaian inovasi daerah melalui layanan yang terintegrasi, indikator ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba.

Uraian Indikator Kunci pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel 4.6 Terlampir.

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, yaitu: **“TOBA MANTAP 2029, MAJU DAERAHNYA, SEJAHTERA RAKYATNYA DAN BERKELANJUTAN PEMBANGUNANNYA”** dapat tercapai.

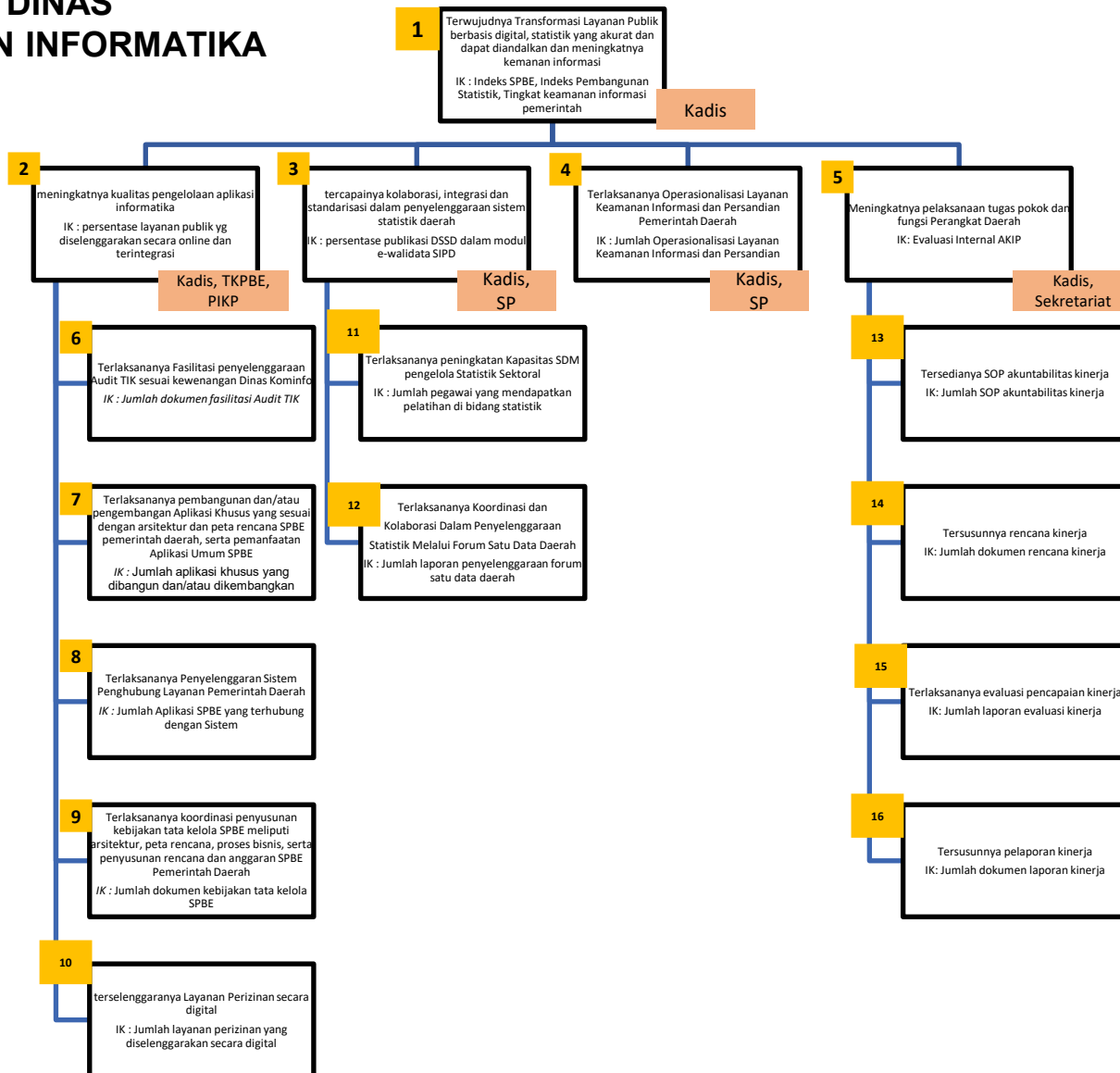
Pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan tergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, untuk implementasi pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba dalam RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029.

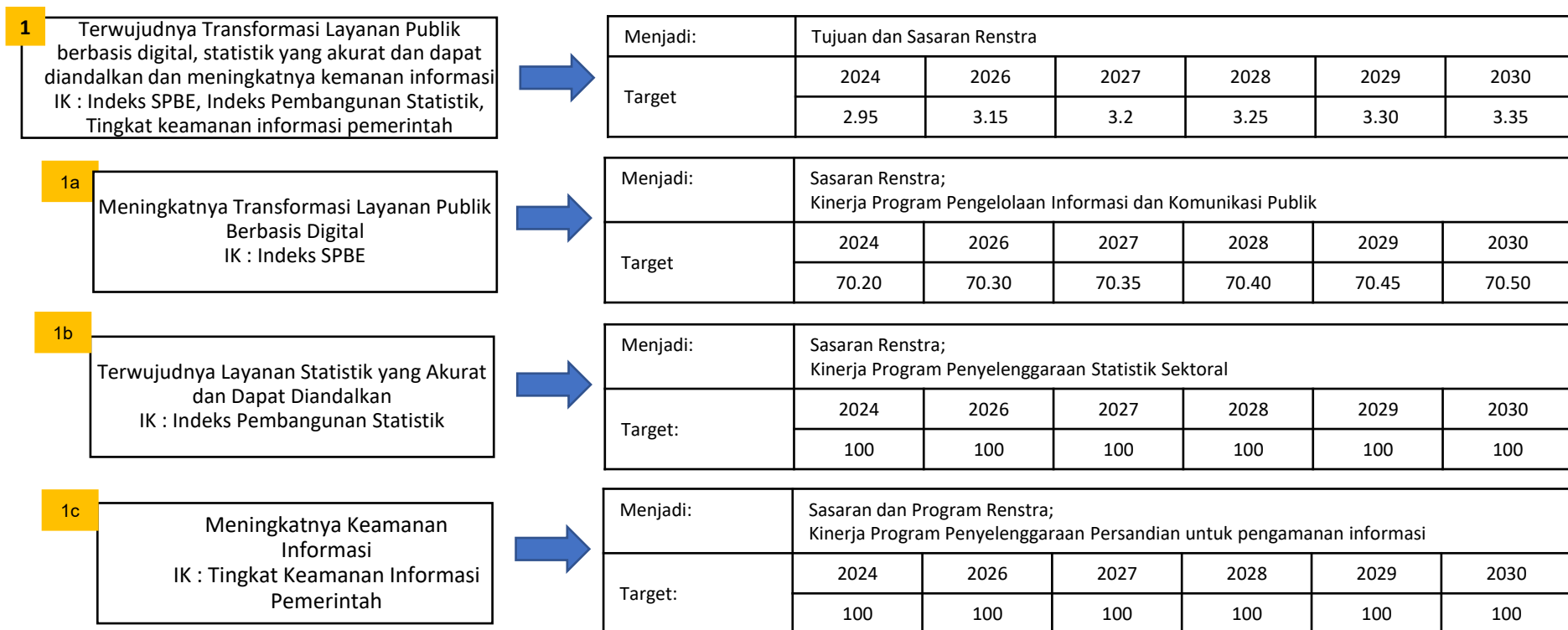

Balige, Oktober 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TOBA

SESMON TOBERIUS BUTARBUTAR, S.Pd., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 197310232007011004

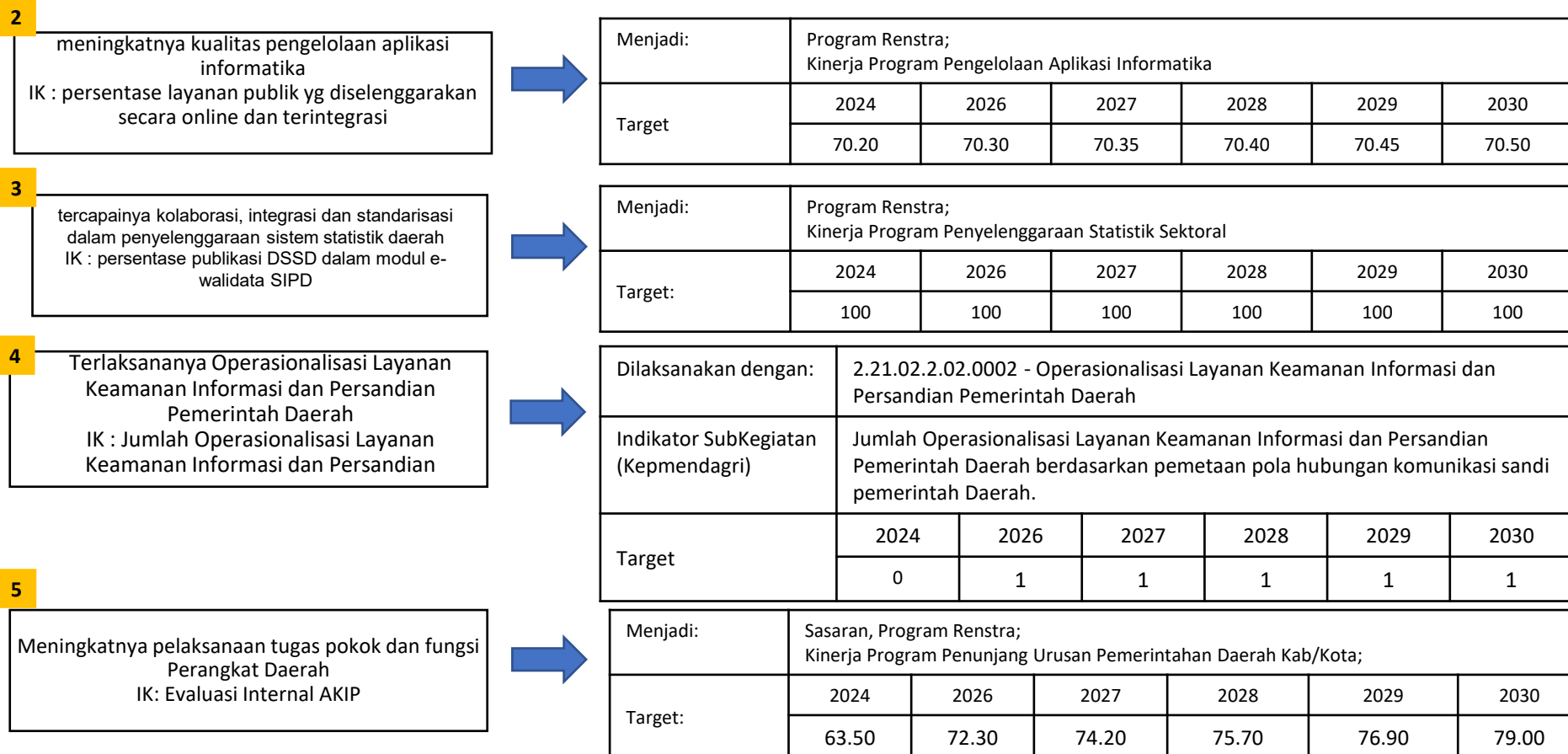
POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. TOBA



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/1



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

6

Terlaksananya Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
IK : Jumlah dokumen fasilitasi Audit TIK



Dilaksanakan dengan:	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	1	1	1	1	1

7

Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
IK : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan



Dilaksanakan dengan:	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	2	4	4	4	4	4

8

Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
IK : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem



Dilaksanakan dengan:	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	1	1	1	1	1

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4

9

Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
 IK : Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE



Dilaksanakan dengan:	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	1	1	1	1	1

10

terselenggaranya Layanan Perizinan secara digital
 IK : Jumlah layanan perizinan yang diselenggarakan secara digital



Dilaksanakan dengan:	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi penyusunan layanan perizinan secara digital					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah layanan perizinan yang diselenggarakan secara digital					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	1	1	1	1	1

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/5

11

Terlaksananya peningkatan Kapasitas SDM pengelola Statistik Sektoral IK : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik



Dilaksanakan dengan:	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	43	43	43	43	43	43

12

Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah IK : Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah



Dilaksanakan dengan:	2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral					
Indikator SubKegiatan (Kepmendagri)	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah					
Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	-	-	-	-	-	-

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/6

13	Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja IK: Jumlah SOP akuntabilitas kinerja	Dilaksanakan dengan:	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	14		Tersusunnya rencana kinerja IK: Jumlah dokumen rencana kinerja	Indikator Subkegiatan (Kependagri)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Target		2024	2026		2027	2028	2029	2030
	3	3	3	3	3	3		
Catatan		Dokumen output: Renja (1), SOP Akuntabilitas Kinerja (1), PK Kepala OPD (1), Rencana Aksi Kinerja (1), Renstra (tahun 2030)						

15	Terlaksananya evaluasi pencapaian kinerja IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja	Dilaksanakan dengan	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	16		Tersusunnya pelaporan kinerja IK: Jumlah dokumen laporan kinerja	Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Target		2024	2026		2027	2028	2029	2030
	3	3	3	3	3	3		
Catatan		Dokumen output: Laporan Evaluasi Renja (4 dok), Laporan Evaluasi Kinerja Periodik (3 dok), LAKIP (1), Laporan untuk LKPJ (1), RFK (12 dok), Laporan Keuangan (1), Evaluasi Renstra (tahun 2028)						

METADATA RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik (indeks)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)																		
Penggunaan Indikator	Indikator Tujuan Dinas Kominfo																		
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.																		
Rumus Perhitungan	Hasil penilaian Indeks SPBE oleh Kemenpan RB																		
Interpretasi	<p>Predikat Indeks SPBE:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 < 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Semakin tinggi nilai indeks SPBE maka semakin baik penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik.</p>	No.	Nilai Indeks	Predikat	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 < 3,5	Baik	4	1,8 < 2,6	Cukup	5	<1,8	Kurang
No.	Nilai Indeks	Predikat																	
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																	
2	3,5 < 4,2	Sangat Baik																	
3	2,6 < 3,5	Baik																	
4	1,8 < 2,6	Cukup																	
5	<1,8	Kurang																	
Sumber Data	Kemenpan RB																		
Frekuensi	Tahunan																		

2. Meningkatnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)

Nama Indikator	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)
Penggunaan Indikator	Indikator Program Dinas Kominfo
Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Layanan Publik: Merupakan proporsi atau bagian dari total layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. 2. Layanan Publik: Merupakan kegiatan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, seperti pendaftaran penduduk, pengajuan izin, dan lain-lain. 3. Diselenggarakan Secara Online: Layanan publik yang dapat diakses dan digunakan melalui internet, tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat pelayanan. 4. Terintegrasi: Layanan publik yang dapat diakses dan digunakan secara bersamaan dengan layanan lainnya, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dalam satu platform.
Rumus Perhitungan	$PLPO = \frac{\sum LPOT}{\sum LP}$ <p>PLPO = Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>$\sum LPOT$ = Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>$\sum LP$ = Jumlah layanan publik</p>
Interpretasi	Semakin tinggi persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online maka semakin mudah masyarakat dalam mengakses layanan publik
Sumber Data	Perangkat Daerah yang membidangi Sub Urusan Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral (%)

Nama Indikator	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (%)
Nama Program	2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Definisi	Persentase ini menunjukkan tingkat keterisian dan keterpublikasian Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) oleh perangkat daerah ke dalam modul E-Walidata pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (DSSD). Indikator ini mencerminkan kinerja daerah dalam mendukung penyediaan data sektoral yang akurat, mutakhir dan dapat diakses untuk perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan publik.
Rumus Perhitungan	$PDSSD = \frac{\sum Data\ Disebarluaskan}{\sum Data\ Disepakati} \times 100\%$ <p>Keterangan: PDSSD= Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD $\sum Data\ Disebarluaskan$ = Jumlah data yang disebarluaskan dalam modul E-Walidata SIPD $\sum Data\ Disepakati$ = Jumlah Data yang disepakati digunakan</p>
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin tinggi keterisian DSSD pada modul e-waidata SIPD yang telah disepakati
Sumber Data	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Bidang Statistik
Frekuensi	Triwulanan

4. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (%)

Nama Indikator	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (%)
Nama Program	2.21.02 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Definisi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah: Merupakan ukuran atau tingkat kemampuan suatu sistem informasi pemerintah untuk melindungi data dan informasi dari ancaman keamanan, seperti serangan siber, penipuan, dan akses tidak sah. 2. Ukuran Keamanan: Dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti: a) Kemampuan Deteksi: Kemampuan sistem untuk mendeteksi adanya serangan atau akses tidak sah. b) Kemampuan Tanggapan: Kemampuan sistem untuk merespons dan mengatasi serangan atau akses tidak sah. c) Kemampuan Pemulihan: Kemampuan sistem untuk memulihkan data dan fungsi setelah serangan.
Rumus Perhitungan	$TKIP = \frac{\sum NKI}{\sum AP} \times 100$ <p>Keterangan: TKIP = Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah $\sum NKI$ = Jumlah nilai per area keamanan informasi $\sum PD$ = Jumlah area penilaian</p>
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator tinggi tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten Toba
Sumber Data	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Bidang Persandian
Frekuensi	Tahunan

5. Meningkatnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)

Nama Indikator	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)
Nama Program	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Definisi	1. Persentase Layanan Publik: Merupakan proporsi atau bagian dari total layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. 2. Layanan Publik: Merupakan kegiatan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat, seperti pendaftaran penduduk, pengajuan izin, dan lain-lain. 3. Diselenggarakan Secara Online: Layanan publik yang dapat diakses dan digunakan melalui internet, tidak memerlukan kehadiran fisik di tempat pelayanan. 4. Terintegrasi: Layanan publik yang dapat diakses dan digunakan secara bersamaan dengan layanan lainnya, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dalam satu platform.
Rumus Perhitungan	$PLP = \frac{\sum LP_{terintegrasi}}{\sum Layanan\ Publik} \times 100$ <p>Keterangan: PLP : Persentase Layanan Publik $\sum LP_{terintegrasi}$: Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi $\sum Layanan\ Publik$: Jumlah layanan publik</p>
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin banyak layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.
Sumber Data	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Triwulanan

6. Meningkatnya penyebaran informasi publik, kebijakan dan program prioritas pemerintah (%)

Nama Indikator	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi (%)
Nama Program	2.16.02 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Definisi	Persentase ini mengukur seberapa banyak individu atau kelompok dalam populasi target yang telah menerima atau terpapar informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah daerah, serta konten tematik dan agenda prioritas nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah.
Rumus Perhitungan	$PKTI = \frac{\sum Masyarakat_{terpapar}}{\sum Penduduk} \times 100$ <p>Keterangan: <i>PKTI</i> : Persentase khalayak yang terpapar informasi program dan kebijakan pemerintah daerah $\sum Masyarakat_{terpapar}$: Jumlah Masyarakat yang menerima atau terpapar informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota $\sum Penduduk$: Jumlah Penduduk</p>
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator semakin besar jumlah masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah
Sumber Data	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Triwulanan

7. Nilai SAKIP (Indeks)

Nama Indikator	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (indeks)
Definisi	Nilai SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Rumus Perhitungan	<i>Nilai SAKIP</i> = Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
Interpretasi	Nilai SAKIP berkisar antara 0-100. Semakin besar nilai indikator, semakin baik nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sumber Data	Nilai SAKIP = Kemenpan RB
Frekuensi	Tahunan